

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP-Desa TAHUN 2023
DESA AMPEL**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL
2023**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-Desa)
TAHUN 2023
DESA AMPEL**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN
DESA AMPEL
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Ampel yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJMDesa;
4. penyusunan rancangan RKPDesa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKPDesa dan DU- RKPDesa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Ampel adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Ampel yaitu :

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Ampel dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Ampel selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Ampel

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 Desa Ampel kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ampel ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Ampel secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Ampel, 30 September 2022
Kepala Desa Ampel



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa adalah unit pemerintahan terbawah dalam struktur organisasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa desa pada hakekatnya merupakan gambaran riil kehidupan bangsa dan negara di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan agama. Apabila melihat kenyataan bahwa kurang lebih 70% penduduk tinggal di desa-desa, maka keberhasilan pembangunan masyarakat didesa akan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal itu maka penyelenggaraan pemerintahan desa harus terus diupayakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya, baik yang mencakup urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan yang menjadi kewenangan desa karena pelimpahan dari kabupaten/ kota, tugas pembantuan, maupun urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) merupakan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa (hasil pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat) yang penyusunannya berpedoman kepada RPJM-Daerah dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat desa.

Secara substansial RKPDesa merupakan rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJM-Desa dan memperhatikan aspirasi masyarakat desa yang memuat arah kebijakan, keuangan desa strategi pembangunan desa, kebijakan umum yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam penyusunannya mempertimbangkan agenda-agenda pembangunan sebelumnya yang dirasa kinerja saat ini belum seluruhnya tuntas penyelesaian masalahnya

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa. Sehingga ketika partisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan “ikut merasa memiliki” terhadap pembangunan didesanya. Selanjutnya masyarakat akan “ikut bertanggung jawab” terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

Didalam sudut pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi Rencana Kerja Pembangunan desa. Berkaitan dengan pembangunan desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal), belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi

yang jelas dan tegas dan kurangnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RKPDesa adalah penting bagi keberadaan dan arah pembangunan desa 1 (Satu) tahun kedepan. RKPDesa memberikan gambaran yang kongkrit tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa ini memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat desa yang didasarkan pada hasil pengkajian keadaan desa (PKD) dan mengacu pada RPJM-Daerah Kabupaten Jember. Proses penyusunan RKPDesa ini dimulai dari tahap pengkajian keadaan desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RKPDesa ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RKPDesa. Sehingga diharapkan RKPDesa ini telah mencerminkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Desa Tamansari .

Rancangan RKPDesa disusun oleh pemerintah desa, dibahas dan disepakati oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2023.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023 , Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

2.1 VISI DAN MISI DESA

1. Visi

Proses penyusunan RKPDesa Ampel sebagai pedoman program kerja Pemerintah Desa Ampel, ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat desa dan seluruh warga masyarakat Desa Ampel maupun para pihak yang berkepentingan. RKP Desa adalah pedoman program kerja untuk masa 1 (Satu) tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Ampel . Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Ampel merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 1 (Satu) tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Ampel disebut juga sebagai Visi Desa Ampel .

Walaupun visi Desa Ampel secara normatif menjadi tanggung jawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Desa Ampel melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Ampel semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RKPDesa Tahun 2023 Dalam momentum inilah visi Desa Ampel yang merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Ampel merupakan arah kebijakan dari RPJMDesa yang dirumuskan setiap enam tahun sekali.

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Bersamaan dengan penetapan RKPDesa Ampel, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Ampel sebagai berikut :

“MEMBANGUN DESA BERSAMA RAKYAT”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, berdasarkan data Profil Desa tahun 2022 sebesar 17.843 jiwa yang terdiri dari 7.984 laki laki dan perempuan 9.859 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	792 Jiwa	886 Jiwa	1.678 Jiwa	9,3 %
2.	5 - 9	648 Jiwa	784 Jiwa	1.432 Jiwa	8,4 %
3.	10 - 14	522 Jiwa	736 Jiwa	1.258 Jiwa	6,1 %
4.	15 - 19	649 Jiwa	674 Jiwa	1.323 Jiwa	7,2 %
5.	20 - 24	571 Jiwa	805 Jiwa	1.376 Jiwa	8,2 %
6.	25 - 29	643 Jiwa	693 Jiwa	1.336 Jiwa	7,8 %
7.	30 - 34	663 Jiwa	658 Jiwa	1.321 Jiwa	7,2 %
8.	35 - 39	639 Jiwa	781 Jiwa	1.420 Jiwa	8,2 %
9.	40 - 44	572 Jiwa	638 Jiwa	1.210 Jiwa	5,8 %
10.	45 - 49	563 Jiwa	894 Jiwa	1.457 Jiwa	8,7 %
11.	50 - 54	558 Jiwa	707 Jiwa	1.265 Jiwa	6,7 %
12.	55 - 59	590 Jiwa	582 Jiwa	1.172 Jiwa	5,7 %
13.	60 - 64	365 Jiwa	461 Jiwa	826 Jiwa	5,5 %
14.	65 +	209 Jiwa	560 Jiwa	769 Jiwa	5,2 %
Jumlah		7984 Jiwa	9.859 Jiwa	17.843 Jiwa	100 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2
Pertumbuhan Angkatan Kerja

Klasifikasi	2020		2021		2022		%
	L	P	L	P	L	P	
Usia Kerja	352	466	343	429	364	454	33,4%
Angkatan Kerja	672	533	681	531	383	556	15,3%
Mencari Kerja	286	271	308	293	326	300	8,7 %

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Ampel masih terdapat 3.996. perempuan yang belum tamat SD dan 5.025 laki laki. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3
Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	3996	5025	9021
2.	Tamat SD	2103	3985	6088
3.	Tidak Tamat SLTP	2157	2011	4168
4.	Tamat SLTP	1646	594	3625
5.	Tamat Akademi / PT	393	594	987
Jumlah		10295	13594	23889

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Ampel, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4

Indikator Kesehatan

URAIAN	2020	2021	2022
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	12	12	12
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
Cakupan Imunisasi	0	0	0
Balita Gizi Buruk	0	0	0

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Ampel sejumlah 1.484 KK, yang tersebar hampir merata di 4 (empat) dusun.

Tabel 5

Kategori Kemiskinan

Kategori	2020	2021	2022
Sangat Miskin	202 KK	205 KK	223 KK
Hampir Miskin	336 KK	341 KK	371 KK
Miskin	807 KK	819 KK	890 KK
Kaya	4437 KK	4503 KK	4895 KK
Sangat Kaya	941 KK	955 KK	1038 KK
JUMLAH	6722 KK	4022 KK	7417 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 6

Pertumbuhan Ekonomi Desa Ampel Tahun 2022

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2022			
2021			
2020			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 7

Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi/ Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	3.654.000 ha	3.654.000 ha	3.654.000 ha
	- Jagung	6.090.000 ha	6.090.000 ha	6.090.000 ha
	- Ubi Kayu	0 ha	0 ha	0 ha
	-dan seterusnya.			

2.	Buah Buahan			
	- Mangga	702 ha	752 ha	709 ha
	-dan seterusnya.			
3.	Perkebunan			
	- Kelapa	109 ha	110 ha	94 ha
	-dan seterusnya.			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 8

Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2020	2021	2022
1	Peternakan			
	- Sapi	171	167	131
	- Kerbau	0	0	0
	- Kambing	321	351	379
	- Ayam	1507	1589	1609
	-dan seterusnya.			
2	Perikanan			
	- Keramba			
	- Tambak			
	- Empang			
	-dan seterusnya.			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Ampel sebagai berikut:

Tabel 9

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	10	2	12
	- Makadam	10	4	14
	- Tanah	0	0	0
	-dan seterusnya.			
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	10	2	12
	- Makadam	10	4	14
	- Tanah	0	0	0
	-dan seterusnya.			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 10

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Saluran Primer	2	-	2
2.	Saluran Skunder	10	2	12
3.	Saluran Tersier	26	6	32
4.	dan seterusnya.	2	-	2

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

Tabel 11

Kondisi Infrastruktur Permukiman

No.	Uraian	2020	2021	2022
1.	Rumah Tidak Sehat	6554 KK	6749 KK	7344 KK
2.	Rumah Tidak Layak Huni	168 unit	73 unit	73 unit
3.	dan seterusnya.			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2022

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember , dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut:*

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*

1. *APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.*
2. *Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan terutama di Jalur pertanian perbatasan dusun krajan, sambiringik dan pomo dan banyak lagi infrastruktur yang di perlukan seperti dinding penahan air yang sangat diperlukan karena di waktu banjir terjadi pengikisan.*
3. *Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehinga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.*
4. *Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.*
5. *.....dan seterusnya.*

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Ampel Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember masuk pada tipologi Desa Ampel sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan selalu di perlukan setiap tahunnya untuk perbaikan data untuk memajukan masyarakat secara majemuk supaya tercipta keadaan yang kondusif, Aman dan Sejahtera dan akhirnya terselenggaralah Pembangunan yang bisa diterima oleh beberapa kalangan baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Ampel di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 5 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera, 4) Terwujudnya Ketahanan Pangan Desa Sesuai dengan perpres 104 Tahun 2021, 5) Terwujudnya Program Jaring Pengaman Sosial atau JPS berupa Bantuan BLT Desa, PKH, BPNT dan Bantuan Lainnya bagi masyarakat Miskin

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan RPJM Desa Ampel tahun 2022 - 2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2022-2027 dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c) Penyediaan Jaminan dan Tunjangan Sosial Kepala Desa dan Perangkat
 - d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e) Penyediaan Tunjangan BPD
 - f) Penyediaan Operasional BPD
 - g) Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW
 - h) Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - i) Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa dan Petugas Lainnya
 - j) Lain – lain sub bidang siltap dan Operasional Pemerintah Desa
 - k) Penyediaan Sarana Aset Desa
 - l) Pemeliharaan Gedung / prasarana Kantor Desa
 - m) Penyusunan dan Pendataan SDGs
 - n) Penyelenggaraan Musdes dll
 - o) Penyusunan RKPDes
 - p) Penyusunan APBDDes Perubahan
 - q) Inventarisasi Aset Desa
 - r) Penyusunan Laporan LPPD Kepala Desa
 - s) Pengembangan Sistim Informasi Desa
 - t) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - a). Penyediaan Honor Guru PAUD
 - b). Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
 - c). Penyelenggaraan Makanan Tambahan balita Stunting, Ibu Hamil dan Kegiatan Posyandu
 - d). Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - e). Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - f). Pngasuhan Bersama Atau Bina Keluarga
 - g). Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
 - h). Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 - i). Lain-lain sub bidang kesehatan
 - j). Pemeliharaan jalan Desa
 - k). Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman
 - l). Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
 - m). Pemeliharaan Jembatan Desa
 - n). Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong – gorong dan Slokan)
 - o). Rehabilitasi / Pembangunan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan.
 - p). Lain -lain Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - a) Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - b) Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat dan Keagamaan
 - c) Lain – lain sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - d) Pembinaan LPMD dan Karang Taruna.
 - e) Operasional PKK
 - f) Pembinaan Karang Werda
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - a) Penguat Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - b) Pemeliharaan Saluran Irigasi
 - c) Pembangunan Saluran Irigasi dan Tersier Sederhana
 - d) Lain – lain sub bidang pemberdayaan Perempuan dan Anak
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya
 - a) Penyelenggaraan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana
 - b) BLT DD

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak *tepi drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.*
2. Kurangnya jaringan *draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.*
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Ketahanan Masyarakat yang kurang maksimal
5. Kualitas Perangkat desa yang kurang optimal dalam melayani masyarakat maka perlu di lakukan pelatihan – pelatihan untuk peningkatan Kapasitas perangkat desa.
6.dan seterusnya.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Ketahanan Pangan minimal 20 % dari penggunaan dana Desa
2. Kegiatan Pengadaan Hidroponik
3. BLT DD minimal 10 % maksimal 25 % ... dan seterusnya

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Kegiatan Griya Asih
2. Operasional dari DD untuk Pemerintah Desa maksimal 30 %
3. Bantuan Modal BUMDES
4. Program Kesehatan Penurunan angka Stunting dan seterusnya.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan Rumah Tidak layak Huni
2. Pariwisata skala desa sesuai dengan Potensi dan karakteristik Desa.
3. dan seterusnya.

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	930.455.000,-
	b. Bumdes	Rp.	10.000.000,-
	c. Pasar Desa	Rp.	1.000.000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.283.348.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	153.947.000,-
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	949.748.218,-
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten		
	a. Dari Pemerintah	Rp.	00.000.000,-
	b. Dari Pemerintah Provinsi	Rp.	00.000.000,-
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	Rp.	00.000.000,-
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp.	00.000.000,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	00.000.000,-
	JUMLAH	RP.	3.328.498.218,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.759.829.218
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	1.015.968.000
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	172.054.000
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	70.647.000
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	310.000.000
TOTAL		Rp.	3.328.498.218,-

- 2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	311.209.200
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	54.507.000
Jumlah		Rp.	365.200.000

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Bunga Bank

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembangunan Jalan Paving di Dusun Kepel
- 2) Pembangunan Joging Track di Lapangan Ampel
- 3) Pengadaan PJU di Lapangan Ampel
- 4) Dranase di Lapangan Ampel
- 5) Pengadaan Papan Informasi Desa

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Ampel
Pada tanggal : 30 September 2022
Kepala Desa Ampel

H. SOLEH